

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di uraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran yang dilakukan oleh unit-unit terkait dimana dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, landasan hukum kegiatan verifikasi oleh PPK-SKPD pada pasal 13 dan pasal 221 permendagri 13/2006.
2. Dalam pelaksanaan anggaran, pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku atau disebut dengan Verifikasi, secara dini melakukan pemeriksaan atas bukti pengeluaran anggaran tersebut sebelum dilakukan pembayaran.
3. Pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Proses pelaksanaan anggaran tersebut terdiri dari beberapa tahapan, yaitu proses penyediaan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, proses pembayaran dan proses pertanggungjawaban. Setiap pelaksanaan proses kegiatan harus diawasi agar sesuai dengan rencana, pedoman dan kriteria yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

5.2. SARAN

Saran yang akan disampaikan berikut ini dibuat berdasarkan pemahaman dan pengalaman langsung selama melakukan kegiatan magang selama 40 hari masa kerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat selaku SKPD hendaknya lebih mengoptimalkan kinerja para staf yang ahli dibidangnya masing-masing dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sehingga dapat dihindari beberapa teguran dari Pejabat Kepala Daerah.
2. Selama satu tahun anggaran yang sedang berlangsung, dalam melakukan semua hal kegiatan dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap akhir hendaknya dapat dipertanggung jawabkan kegiatan-kegiatan tersebut, jangan sampai menunggu pekerjaan lain hingga menumpuk dan pada akhirnya melupakan membuat laporan pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah berlalu hingga kurun waktu yang terbilang cukup lama.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu meningkatkan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah dan harus lebih bijak dalam melaksanakan pengawasan anggaran daerah agar tercipta kualitas yang lebih baik guna mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan.